

DPMPPTSP

PROV. KALTIM

**RANCANGAN
RENCANA
KERJA**

RANCANGAN RENJA

SKPD

**SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH**

TAHUN

2023

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)

Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telepon (0541) 74387, Fax. (0541) 736446 Samarinda 75112

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya, **Rencana Kerja Perangkat Daerah** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini dapat kami susun.

Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021 mengalami perubahan program kegiatan yang dilandasi oleh Permendagri No. 90 Tahun 2019. Rencana Kerja untuk tahun anggaran 2023 terdiri 6 Program, 13 Kegiatan dan 37 Sub. Kegiatan, dari 6 program tersebut terdapat 2 (dua) program prioritas yaitu **Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** yang sebagai wujud komitmen kami untuk meningkatkan realisasi investasi dengan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan investasi yang sejalan dengan menciptakan Pelayanan Penanaman Modal yang mudah, cepat, murah, tepat dan transparan terhadap Calon Investor akan terus kami bangun dan kembangkan serta memberikan informasi mengenai potensi-potensi daerah.

Demikian rencana kerja ini disampaikan, untuk menjadi bahan masukan dan pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Samarinda, 15 Maret 2022

Kepala,



PUGUH HARJANTO, S.STP., M.SI

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197908101998021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang.....	01
1.2	Landasan Hukum	02
1.3	Maksud dan Tujuan	04
1.4	Sistematika Penulisan	04
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020		
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2020 dan Capaian Realisasi Terhadap Renstra PD.....	06
2.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	06
2.1.2	Program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	08
2.1.3	Program Promosi Penanaman Modal	09
2.1.4	Program Pelayanan Penanaman Modal	09
2.1.5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	10
2.1.6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.....	10
2.1.7	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	11
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Kab/Kota.....	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		
3.1	Tela'ahan Kebijakan Nasional.....	28
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	30
3.2.1	Tujuan	30
3.2.2	Sasaran Program Kegiatan.....	31
3.3	Program Kegiatan	31
3.3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	32
3.3.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.....	35
3.3.3	Program Promosi Penanaman Modal	36
3.3.4	Program Pelayanan Penanaman Modal	37
3.3.5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	38

	3.3.6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.....	40
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
	4.1	Rencana Kerja Perangkat Daerah	41
	4.2	Rencana Pendanaan Perangkat Daerah.....	41
BAB	V	PENUTUP.....	50

Lampiran :

1. Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
2. Berita Acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur.....	12
Tabel 2.2	Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2022 Provinsi Kalimantan Timur....	20
Tabel 3.1	Matriks RPJPD Prov. Kaltim.....	28
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2021	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun lalu telah memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat. Banyak prestasi yang telah diraih, namun bukan berarti permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur menyurut. Sebaliknya, era liberalisasi ekonomi yang terus bergulir menawarkan banyak tantangan. Permasalahan pembangunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana wajah Provinsi Kalimantan Timur kini dan masa akan datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara lebih baik, fokus, dan konsisten.

Salah satu upaya agar kita dapat memproyeksikan diri di masa depan adalah dengan sungguh-sungguh memahami kondisi Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih terus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di masa datang. Langkah tersebut juga harus dibarengi dengan upaya mengenali berbagai potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur untuk dikembangkan demi meningkatnya kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode satu tahun kedepan. Rencana Kerja ini merupakan jabaran dari Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan merupakan operasionalisasi dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023. Rencana Kerja memuat gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun (Tahun 2023) serta menjawab apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.2 Landasan Hukum

Dasar yang menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah sbb ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Permendagri No. 54 tahun 2010, tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ;
8. Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Tata Cara Rancangan Perda, RPJPD dan RPJMD) serta Tata Cara Perubahan (RPJPD, RPJMD dan RENJA Pemda) ;
9. Permendagri No. 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
11. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 ;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim ;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang P-RPJMD 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur ;

15. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur ;
16. Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ;
17. Berita Acara Forum Perangkat Daerah tentang Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi, Kab/ Kota Se-Kalimantan Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Kerja ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai kurun waktu setahun yang lalu, disertai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam realisasi dan operasionalisasi program dan kegiatan serta proyeksi dan target yang diharapkan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan setahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Anggaran dan Capaian Realisasi

Terhadap Renstra PD

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Anggaran

2.1.2 Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tela'ahan Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perumusan Program Prioritas

4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2021 dan Capaian Realisasi Terhadap Renstra PD

Bab ini memuat revidi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah murni dan anggaran perubahan (APBD-P) pada tahun anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 25.062.900.000,-** . Berikut Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja sbb :

2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp17.093.182.850,00 pada Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp14.645.048.008,00 atau 85,68%.

- ***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp640.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp421.775.845,00 atau 65,90%. Beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal karena pandemi Covid-19.

- ***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp11.758.569.760,00 dan terealisasi sebesar Rp10.420.508.083,00 atau 88,62%.

- ***Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp64.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.080.000,00 atau 20,33%. Realisasi tidak mencapai target karena pada tahun berjalan terjadi penurunan besaran honorarium pengurus barang yang jauh dari standar pada saat penyusunan anggaran serta adanya honorarium yang tidak boleh dibayarkan.

- ***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp221.490.000,00 dan terealisasi sebesar Rp79.015.000,00 atau 35,67%. Realisasi masih belum mencapai target yang telah ditetapkan karena kegiatan mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi tidak dapat direalisasikan akibat adanya kekhawatiran terhadap Covid-19.

- ***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.585.966.957,00 dan terealisasi sebesar Rp1.188.090.309,00 atau 74,91%.

- ***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.417.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.336.055.000,00 atau 94,23%.

- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp603.837.033,00 dan terealisasi sebesar Rp551.609.024,00 atau 91,35%.

- ***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp801.129.100,00 dan terealisasi sebesar Rp634.914.747,00 atau 79,25%.

2.1.2 Program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.690.013.950,00 pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.599.410.641,00 atau 94,64%.

- ***Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp890.013.950,00 dan terealisasi sebesar Rp851.094.750,00 atau 95,63%.

- ***Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp748.315.891,00 atau 93,54%.

2.1.3 Program Promosi Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.360.000.000,00 pada Program Promosi Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.163.915.687,00 atau 85,58%.

- ***Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.163.915.687,00 atau 85,58%

2.1.4 Program Pelayanan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.760.000.000,00 pada Program Pelayanan Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.354.323.701,00 atau 76,95%.

- ***Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.760.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.354.323.701,00 atau 76,95%.

2.1.5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.599.703.000,00 pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.069.577.836,00 atau 41,14%.

- ***Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.599.703.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.069.577.836,00 atau 41,14%. Realisasi tidak mencapai target yang diharapkan karena terjadinya lonjakan Covid-19 dipertengahan tahun sehingga kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi ke perusahaan pada saat itu tidak dapat dilaksanakan

2.1.6 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp560.000.200,00 pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp497.062.784,00 atau 88,76%.

- ***Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp560.000.200,00 dan terealisasi sebesar Rp497.062.784,00 atau 88,76%.

2.1.7 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara keseluruhan pencapaian target masih belum memuaskan karena dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Merebaknya pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang cukup ketat di awal-awal merebaknya wabah Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda atau bahkan dibatalkan pelaksanaannya.
2. Ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan bahkan ada yang tidak dapat dilaksanakan
3. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola Bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berubah-ubah dalam satu tahun terakhir dari hal perencanaan kegiatan/anggaran, penatausahaan keuangan sampai dengan hal-hal yang teknis.
5. SDM (Staf Pegawai ASN) yang terbilang kurang memadai.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	18	01			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal	86 %	0				85 %		
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	75 Nilai AKIP	0				65 Nilai AKIP	51,09	68,12
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	18 Dokumen	0				4 Dokumen	4	22,22
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	17 Laporan	0				3 Laporan	3	17,65
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	72 Dokumen	0				24 Dokumen	24	33,33
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan daftar gaji dan tunjangan	36 Laporan	0				12 Laporan	12	33,33
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi	162 Orang	0				Orang	0	0,00
2	18	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	3000 Laporan	0				1000 Laporan	1000	33,33
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	6 Orang	0				2 Orang	2	33,33
2	18	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan kartu inventaris ruangan (KIR) yang disusun	51 Laporan	0				17 Laporan	17	33,33
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	320 Pegawai	0				100 Pegawai	100	31,25

2	18	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	350 Stel	0			110 Stel	110	31,43
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	0			10 Orang	10	20,00
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	36 Bulan	0			12 Bulan	12	33,33
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	27 Jenis	0			9 Jenis	9	33,33
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	24 Jenis	0			8 Jenis	8	33,33
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan pelaksanaan cetakan dan penggandaan	36 Bulan	0			12 Bulan	12	33,33
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	288 Bahan Bacaan	0			96 Bahan Bacaan	96	33,33
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	327 Kegiatan	0			109 Kegiatan	109	33,33
2	18	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah ruangan yang difasilitasi media berbasis elektronik untuk rapat-rapat online	30 Ruangan	0			20 Ruangan	20	66,67
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	248 Unit	0			76 Unit	76	30,65
2	18	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan mobil jabatan yang diadakan	1 Unit	0			1 Unit	1	100,00
2	18	01	1.07	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 Unit	0			1 Unit	1	33,33
2	18	01	1.07	06	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang diadakan	97 Unit	0			36 Unit	36	37,11
2	18	01	1.07	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan	144 Unit	0			38 Unit	38	26,39
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	36 Bulan	0			12 Bulan	12	33,33
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	36 Bulan	0			12 Bulan	12	33,33
2	18	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	36 Bulan	0			12 Bulan	12	33,33
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan administrasi perkantoran yang terlayani	36 Bulan	0			12 Bulan	12	33,33
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara	16 Kegiatan	0			6 Kegiatan	6	37,50
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas	35 Unit	0			15 Unit	15	42,86

2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terawat	23 Jenis	0			8 Jenis	8	34,78
2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan yang terlaksana	7 Kegiatan	0			5 Kegiatan	5	71,43
2	18	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang terlaksana	6 Kegiatan	0			2 Kegiatan	2	33,33
2	18	02			PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal	8 Dokumen	0			4 Dokumen	4	50,00
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pemberian fasilitas insentif dan kemudahan berusaha	2 Kegiatan	0			2 Kegiatan	2	100,00
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Regulasi	0			1 Regulasi	1	100,00
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	0			1 Dokumen	1	100,00
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	6 Dokumen	0			2 Dokumen	2	33,33
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur	3 Dokumen	0			1 Dokumen	1	33,33
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah dokumen kajian peta potensi investasi	3 Dokumen	0			1 Dokumen	1	33,33
2	18	03			PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi	30 Laporan	0			9 Laporan	9	30,00
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	32 Kegiatan	0			9 Kegiatan	9	28,13
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil pertemuan promosi penanaman modal	11 Dokumen	0			2 Dokumen	2	18,18
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi	21 Pameran	0			7 Pameran	7	33,33
2	18	04			PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	10 Hari	0			12 Hari	5	100,00
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	4350 Izin/ Non Izin	0			1500 Izin/ Non Izin	1500	34,48
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelatihan pelayanan yang prima berbasis elektronik	8 Kegiatan	0			4 Kegiatan	4	50,00

2	18	04	1.02	02	<i>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</i>	30000 NIB	0			15000 NIB	15000	50,00
2	18	04	1.02	03	<i>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan</i>	<i>Jumlah persentase pengaduan yang terlayani</i>	100 Persen	0			15 Persen	15	15,00
2	18	04	1.02	04	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</i>	<i>Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi</i>	25 Laporan	0			5 Laporan	5	20,00
2	18	05			PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	0			100 %	100	100,00
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	21 Perusahaan	0			6 Perusahaan	6	28,57
2	18	05	1.01	01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)</i>	21 LKPM	0			6 LKPM	6	28,57
2	18	05	1.01	02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah perusahaan yang dibina</i>	21 Perusahaan	0			6 Perusahaan	6	28,57
2	18	05	1.01	03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah perusahaan yang diawasi</i>	21 Perusahaan	0			6 Perusahaan	6	28,57
2	18	06			PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan	13 Kegiatan	0			4 Kegiatan	4	30,77
2	18	06	1.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media elektronik yang tersedia	8 Media	0			2 Media	2	25,00
2	18	06	1.01	01	<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Jumlah aplikasi informasi yang diolah/ disajikan</i>	8 Aplikasi	0			2 Aplikasi	2	25,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 65 Tahun 2016, tugas pokok DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah ***“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”*** dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang perizinan dan penanaman modal sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan dibidang perizinan dan penanaman modal;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengembangan penanaman modal;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
6. Peyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja adalah salah satu alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan

sasarannya. Capaian kinerja merupakan rambu atau tanda apakah sasaran kegiatan yang dilakukan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik dapat menghasilkan informasi kinerja yang member indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya, bila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja, maka dapat mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja pada dasarnya tidak hanya digunakan saat penyusunan laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja dapat juga merupakan komponen yang krusial sejak merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Adanya indikator kinerja menuntut perencanaan harus sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja bertujuan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang lebih sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menjalankan misi Lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Isu-isu ini menjadi dasar dalam menentukan program dan kegiatan skala prioritas selama lima (5) tahun kedepan. Isu tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama. Terdapat empat belas (14) perubahan yang saat ini harus diperhatikan, yaitu ;

1. Liberalisasi perdagangan;
2. Pencapaian Milenium Development Goal's (MDG's);
3. Kenaikan harga produk pangan dan kelangkaan sumber energi;
4. Arus demokratisasi yang tidak bisa dibendung;
5. Terbukanya pasar bebas tenaga kerja (AFTA) Tahun 2015;
6. Pembatasan produksi sector primer (minyak, gas dan batu bara);
7. Pengembangan industry bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;
8. Pembangunan dan pengembangan produktivitas sector pertanian dalam arti luas;
9. Pengembangan industri turunan minyak, gas dan batu bara;
10. Pengembangan industri pertanian dalam arti luas;
11. Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT);
12. Pengembangan sektor jasa, perdagangan dan keuangan;
13. Pengembangan industri pariwisata; dan
14. Pengembangan infrastruktur pendukung industri.

Berdasarkan isu-isu diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur perlu memberi

perhatian pada isu yang berhubungan dengan peningkatan Iklim Investasi di daerah, karena sangat menentukan besar kecilnya modal yang diinvestasikan. Iklim Investasi merupakan perpaduan antara sumberdaya alam yang tersedia dan kreatifitas dalam merencanakan dan mengorganisasikan antar kementerian dan lembaga terkait. Semangat otonomi daerah memberikan konsekuensi kepada setiap provinsi dan kabupaten/ kota untuk lebih efektif dalam menarik investasi melalui strategi kemudahan dan insentif. Keadaan tersebut menimbulkan Iklim Persaingan yang kompetitif dan perlu didukung oleh kebijakan nasional dengan tidak membatasi atau mempersulit Iklim Investasi di Daerah.

Iklim usaha yang kondusif akan menaikkan realisasi investasi yang memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran). Perkembangan dunia usaha dan tren investasi global sangat mempengaruhi perluasan dan pertumbuhan sektor industri. Bidang agroindustri dan energi terbarukan diharapkan menjadi tulang punggung menuju visi Kaltim 2025.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal (Ranwal) RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Rancangan Awal RKPD	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Hasil Analisis Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rancangan Awal RKPD				28.669.489.000	Hasil Analisis Kebutuhan				34.000.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85,00 %	19.369.489.000	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85,00 %	20.750.000.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	71 Nilai AKIP	1.100.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	71 Nilai AKIP	2.000.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	700.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.000.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	400.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.000.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	24 Dokumen	13.515.765.754	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	24 Dokumen	13.515.765.754
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang / Bulan	10.115.765.754	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang / Bulan	10.115.765.754
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	3.000.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	3.000.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	400.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	400.000.000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	2 Orang	61.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	2 Orang	61.800.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan	61.800.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan	61.800.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Pegawai	547.570.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Pegawai	212.070.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6 Paket	462.570.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6 Paket	127.070.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	85.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	85.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	1.028.706.855	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	1.028.706.855
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	24.714.144	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	24.714.144
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	261.823.544	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	261.823.544
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.975.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.975.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	19.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	19.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	712.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	712.200.000

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	4.794.167	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	4.794.167
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	76 Unit/Tahun	797.590.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	76 Unit/Tahun	577.570.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	220.020.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0
Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36 Paket	49.500.000	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36 Paket	49.500.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit	528.070.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit	528.070.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	961.365.591	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	961.365.591
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	515.500.041	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	515.500.041
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	105.843.550	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	105.843.550
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	340.022.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	340.022.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara	6 Kegiatan	1.356.690.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara	6 Kegiatan	2.392.721.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	398.775.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	398.775.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	8 Unit	219.936.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	8 Unit	219.936.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	608.899.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.644.930.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	129.080.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	129.080.000
PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal	2 Dokumen	2.000.000.000	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal	2 Dokumen	3.000.000.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	2 Dokumen	2.000.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	2 Dokumen	3.000.000.000
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.000.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.500.000.000
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Samarinda	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	1.000.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Samarinda	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	1.500.000.000
PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi	10 Laporan	2.000.000.000	PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi	10 Laporan	3.500.000.000
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	10 Kegiatan	2.000.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	10 Kegiatan	3.500.000.000
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	3 Dokumen	800.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	3 Dokumen	1.500.000.000

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	7 Dokumen	1.200.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	7 Dokumen	2.000.000.000
PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	12 Hari	3.000.000.000	PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	12 Hari	3.500.000.000
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1400 Izin/ Non Izin	3.000.000.000	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1400 Izin/ Non Izin	3.500.000.000
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	2 Pelaku Usaha	500.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	2 Pelaku Usaha	500.000.000
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	5 Kegiatan Usaha	1.500.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	5 Kegiatan Usaha	2.000.000.000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	10 Orang	500.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	10 Orang	500.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	2 Kegiatan Usaha	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	2 Kegiatan Usaha	500.000.000

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	1.500.000.000	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	2.250.000.000
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	7 Perusahaan	1.500.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	7 Perusahaan	2.250.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Kegiatan Usaha	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Kegiatan Usaha	750.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Pelaku Usaha	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Pelaku Usaha	750.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 Kegiatan Usaha	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 Kegiatan Usaha	750.000.000
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan	4 Kegiatan	800.000.000	PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan	4 Kegiatan	1.000.000.000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media elektronik yang tersedia	3 Media	800.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media elektronik yang tersedia	3 Media	1.000.000.000
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	800.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	1.000.000.000

Pada tabel 2.13 diatas merupakan rencana kerja tahun (n+1) yang dimaksud adalah rencana tahun anggaran 2021, merupakan perubahan dari Permendagri No. 13 tahun 2006 menjadi Permendagri No. 90 tahun 2019. Yang sekarang telah diketahui banyaknya perubahan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2021 dan terindikasi satu bidang khususnya Bidang Pelayanan Pengaduan (YANDU) akan mengalami perubahan nomenklatur apabila mengacu pada Permendagri No. 90 tahun 2019, serta perubahan yang sangat mendasar adalah Perangkat Daerah sangat dimungkinkan untuk me-review kembali Renstra 2019-2023 Perangkat Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Kab/ Kota

Rancangan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah (PD) Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan pada 08 Maret Tahun 2022 yang sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan perizinan DPMPTSP Provinsi Kaltim dengan melakukan diklat kepada petugas di Kab/Kota dalam penggunaan aplikasi OSS RBA, terutama dalam memberikan layanan berbantuan kepada masyarakat pemohon.
2. Penyesuaian Program/Kegiatan sesuai Kepmendagri 050/2019, indikator kinerja berdasarkan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021 dan Penyusunan Renstra Kabupaten/Kota sehingga cascading antara Program/Kegiatan Prioritas Provinsi dengan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota sehingga terjadinya keselarasan kegiatan antara Pemerintahan Provinsi dan Kab/Kota.

3. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur akan mempunyai Program Kerja Major Project yaitu Desk Corner di 9 Kabupaten/Kota sehingga perlunya dukungan dari Bappeda dan anggota Tim TAPD.
4. DPMPTSP Provinsi Kaltim mempunyai rencana untuk memiliki kantor baru di karenakan penilaian dari MenpanRB /BKPM /Ombudsman dan BPK bahwa fasilitas yang ada sekarang kurang memadai.
5. Perlunya dukungan bersama 10 Kabupaten/Kota untuk mendukung Program Kerja Gubernur Kalimantan Timur (38 Dedicated).
6. Kajian Investasi Industri Manufaktur Pengelolaan Pakan Ternak merupakan salah satu penunjang peluang investasi. Seperti yang diketahui Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki pabrik pakan. Peluang investasi dan pasar juga ada. Terlebih lagi semua Kabupaten / Kota akan menjadi sentral IKN. Oleh karena itu adalah salah satu penunjang peluang investasi.
7. Tim P3K Dinas Peternakan telah menyusun dan melakukan uji public 3 (tiga) buku yaitu buku peluang investasi Sistem Integrasi Sapi – Kelapa Sawit (SISKA), buku Komoditas Ternak dan buku komoditas Telur yang akan disempurnakan dan di launching oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang pastinya akan menjadi media promosi sebuah peluang investasi.
8. DPMPTSP Provinsi memohon kepada Kabupaten / Kota mengupdate data peluang investasi yang ada di Kabupaten / Kota masing-masing agar dapat meningkatkan kembali peluang investasi.

BAB III


TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tela'ahan Kebijakan Nasional

Sejalan tujuan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, dimana arah tujuan tersebut adalah “*Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya*” yang memiliki permasalahan pokok sebagai berikut penjelasannya (lihat tabel 3.1) :

Tabel 3.1 Matriks RPJPD Prov. Kaltim

TUJUAN RPJPD	SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan	Daya saing investasi industri belum optimal	Regulasi terutama terkait perijinan yang belum efektif	Ketersediaan dan validasi terhadap data statistik dan spasial yang kurang mendukung Perubahan kebijakan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota

 = Tujuan Utama RPJPD

Dengan permasalahan pada tabel 3.1 diatas maka strategi yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Mendorong berkembangnya Penanaman Modal diberbagai sektor yang mencakup Sektor Primer, Sekunder dan Tersier dalam rangka meningkatkan persebaran.
2. Mendorong berkembangnya Penanaman Modal berbasis keunggulan daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja.

3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan baik di Pusat maupun di daerah.
4. Mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha dalam rangka meningkatkan daya tarik penanaman modal.
5. Membangun sistem informasi secara elektronik untuk mempercepat pendaftaran izin dan prosesnya.
6. Membangun dan mengembangkan sistem informasi berkenaan data rencana dan realisasi investasi serta mempublikasikannya ke instansi pemerintah/ swasta dan masyarakat luas.
7. Mengevaluasi dan merevisi SOP dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim khususnya di Bidang Pelayanan Perizinan.
8. Membuat dan merevisi berkenaan peraturan-peraturan kebijakan tentang percepatan dan kemudahan untuk berinvestasi.
9. Memberikan informasi kepada investor atau mitra kerjasama mengenai potensi dan peluang untuk berinvestasi.

Sejalan dengan kebijakan Nasional tersebut diatas, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 65 Tahun 2016, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah ***“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”***.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan goal yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan terukur melalui indikator dan standar yang sudah ditetapkan, maka terdapat beberapa penjelasan mengenai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah :

3.2.1 Tujuan

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/0214/B.P3D-Bapp/2021 Tentang Sinkronisasi Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 maka Rancangan Awal Rencana Strategis dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi dan tujuan Gubernur serta wakil gubernur provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 sebagai adalah **“Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara”**. Untuk mencapainya tujuan tersebut maka dibuatlah rumusan strategi yaitu Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non Migas dan Non Batubara, yang menjadikan DPMPTSP memiliki program prioritas.

3.2.2 Sasaran Program Kegiatan

Sasaran program kegiatan DPMPTSP yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan visi dan misi Gubernur terpilih periode 2019-2023 Bapak Isran Noor dan Bapak Hadi Mulyadi terdiri dari enam sasaran yaitu:

1. Terwujudnya Peningkatan Aparatur Sipil Negara dan sarana prasarana penunjang ;

2. Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Lebih Mudah dan Cepat ;
3. Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ;
4. Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategis ;
5. Terselenggaranya Penyusunan Strategi Promosi dan Kegiatan Promosi Penanaman Modal ;
6. Terinformasikannya Pengurusan Pelayanan Perizinan secara Elektronik.

Sedangkan sasaran strategis merupakan bagian integral dalam suatu proses perencanaan strategis yang terfokus pada kegiatan tertentu serta adanya keterkaitan dengan dokumen RPJMD yang telah disepakati pada waktu forum-forum perencanaan kegiatan. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah “Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara dengan target 35,00 Triliun Rupiah”

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 mencakup 6 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan yaitu :

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pada kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan dan anggaran yang terdapat beberapa rencana pendanaan sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan :

- *Penyusunan Reviu Renstra 2019-2023*
- *Kegiatan Forum Perangkat Daerah Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi, Kab / Kota Se Kaltim*
- *Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA).*

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan :

- *Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).*
- *Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Penyusunan LPPD, IKI, IKU, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Rencana Aksi dan LKjIP/LAKIP).*

II. Administrasi Keuangan

Pada kegiatan ini merupakan rencana pendanaan untuk administrasi keuangan dan belanja gaji PNS dan Non PNS serta pendukung kegiatan pada bagian keuangan. Sub kegiatan terdiri dari :

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;

4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ;
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan kartu inventaris ruangan (KIR).

6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ;
8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

V. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini merupakan belanja mengikat pada perangkat daerah, karena pada kegiatan ini merupakan belanja rutinitas. Berikut sub kegiatan yang terdiri dari :

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ;

14. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini merupakan penyediaan sarana dan prasarana dalam bentuk barang guna meningkatkan performa dan kinerja aparatur ASN dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim. Berikut beberapa sub kegiatan yang akan dilaksanakan :

15. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;

16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;

17. Pengadaan Mebel ;

18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini merupakan penyediaan prasarana dalam bentuk jasa guna meningkatkan performa dan kinerja aparatur ASN dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim. Berikut beberapa sub kegiatan yang akan dilaksanakan :

19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;

20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;

21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini merupakan pemeliharaan dalam bentuk barang dan jasa guna meningkatkan performa dan kinerja aparatur ASN dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim. Berikut beberapa sub kegiatan yang akan dilaksanakan :

22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ;
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

3.3.2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

IX. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Sub kegiatan terdiri dari :

26. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
 - *Workshop Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.*
 - *Workshop RUPMP.*
 - *Kajian Direktori Investasi.*
 - *Kajian Investasi (IPRO) Sektor Unggulan di Kab. PPU.*
 - *Buletin Investasi.*

27. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi. Berikut

rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Workshop Bimtek PIR.*
- *Aplikasi SI PINTAR.*
- *Kajian Investasi (IPRO) Sektor Unggulan Kab. Kubar.*
- *Kajian Investasi (IPRO) Sektor Unggulan Kab. Mahulu.*
- *Kajian Investasi (IPRO) Sektor Unggulan Kab. Paser.*

3.3.3 Program Promosi Penanaman Modal

X. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Sub kegiatan terdiri dari :

28. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Kegiatan Matchmaking Dunia Usaha (2 Kali Kegiatan).*
- *Belanja Peralatan Pendukung Dokumentasi.*

29. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Pelaksanaan Event Pameran Dalam Daerah (2 Kali Event).*
- *Pelaksanaan Event Pameran Luar Daerah (7 Kali Event).*

3.3.4 Program Pelayanan Penanaman Modal

XI. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

30. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Dalam Manajemen Perizinan Investasi Se-Kab/Kota.*

- *Bimbingan Teknis Service Excellence Tahun 2023.*

31. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Kegiatan sosialisasi dan Pelatihan OSS.*

- *Koordinasi dan sinkronisasi data antar Kab dan Kota Kalimantan Timur.*

32. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan se OPD teknis terkait Kab/Kota se Kalimantan Timur.*

- *Kegiatan Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan se OPD teknis terkait Provinsi Kalimantan Timur.*
 - *Pembentukan Tim penanganan pengaduan Litigasi dan Non Litigasi*
33. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
- *Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan se Kaltim.*
 - *Rapat Tim Teknis Proses Perizinan dan Non Perizinan*
 - *Koordinasi, Pemantauan, Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan proses perizinan dan non perizinan.*

3.3.5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

XII. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Pada kegiatan tersebut memiliki tiga sub kegiatan yang terdiri dari :

34. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
- *Kegiatan Sosialisasi LKPM Online dan Penerapannya (2 Kali Kegiatan).*
 - *Menghadiri/Mengikuti Rapat, Workshop, Sosialisasi, Koordinasi dan Konsolidasi.*

- *Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Kalimantan Timur.*
 - *Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Luar Kalimantan Timur.*
35. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
- *Kegiatan Sosialisasi Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (3 Kali Kegiatan)*
 - *Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Kalimantan Timur.*
 - *Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Luar Kalimantan Timur.*
36. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
- *Pembentukan Tim Pemecah Masalah dan Percepatan Realisasi Investasi di KPIK.*
 - *Kegiatan Pengawasan ke Perusahaan di Wilayah KPIK dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.*
 - *Kegiatan Pengawasan ke Perusahaan yang berlatas atau berkantor di luar daerah Provinsi Kalimantan Timur.*
 - *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal.*

3.3.6 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

XIII. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan ini terindikasi menjadi bidang baru, pada kegiatan ini hanya terdapat satu sub kegiatan yaitu :

37. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Kegiatan FGD Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Kab/Kota Se-Kalimantan Timur.*
- *Pembentukan Tim Pengelola Website DPMPTSP Prov Kalimantan Timur.*
- *Pembentukan Tim PPID Pembantu.*
- *Pengembangan Sistem Layanan Perizinan dan Nonperizinan.*

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah

Di dalam pembahasan forum Finalisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur, khususnya untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah disepakati bahwa untuk rencana kerja tahun 2023 rencana program prioritas terdiri dari 2 (dua) program yaitu **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dan **Program Pelayanan Penanaman Modal**. Pada program tersebut bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi sektor non migas dan non batubara serta pelaksanaan untuk membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan industri/perusahaan yang bernilai meningkatkan investasi di Kalimantan Timur, diseluruh Kalimantan Timur terutama dikawasan Kariangau dan Balikpapan sekitarnya.

4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Rumusan rencana pendanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 yang sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur serta telah dianalisa ada beberapa program yang berubah Pada program kemudahan layanan dan percepatan proses perizinan yang semula targetnya adalah “izin/ non izin” menjadi “hari” penyesuaian dan kesepakatan ini diambil pada saat Musrenbang pada tanggal 16 dan 17 Januari 2019 silam. Dan terdapat hampir secara keseluruhan perubahan redaksi atau nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini dikarenakan penyesuaian dan telah

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Dan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 Maka dalam hal ini DPMPTSP Prov. Kaltim telah melakukan pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setelah dianalisa terdapat satu bidang yang berubah secara keseluruhan tugas pokok dan fungsinya, yaitu yang sebelumnya Bidang Pelayanan Pengaduan Advokasi (YANDU) menjadi Bidang Pengolahan Data, oleh karena itu harus ada perbaikan dalam hal struktur organisasi dan tugas-tugas pokok yang jelas.

Dalam hal lain nilai investasi dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) merupakan target khusus yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, dan yang akan disepakati menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) milik DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi perjanjian kinerja Kepala Dinas dengan Kepala Daerah.

Program/ kegiatan pendukung prioritas merupakan upaya untuk mendukung tercapainya sasaran program prioritas serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan salah satu untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Kepala daerah pada periode tahun 2019-2023.

Tabel 4.1 Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Tahun 2023

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja 2024	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(10)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									28.669.489.000				34.000.000.000
2	18	01			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		85,00 %	19.369.489.000			85,00 %	20.750.000.000
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		71 Nilai AKIP	1.100.000.000			71 Nilai AKIP	2.000.000.000
2	18	01	1.01	01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	700.000.000	APBD		7 Dokumen	1.000.000.000
2	18	01	1.01	07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	400.000.000	APBD		4 Laporan	1.000.000.000

2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu		24	Dokumen	13.515.765.754			24	Dokumen	13.515.765.754
2	18	01	1.02	01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Orang / Bulan	10.115.765.754	APBD		12	Orang / Bulan	10.115.765.754
2	18	01	1.02	02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	Dokumen	3.000.000.000	APBD		100	Dokumen	3.000.000.000
2	18	01	1.02	03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000	Dokumen	400.000.000	APBD		1000	Dokumen	400.000.000
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah		2	Orang	61.800.000			2	Orang	61.800.000
2	18	01	1.03	06	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17	Laporan	61.800.000	APBD		17	Laporan	61.800.000
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan		100	Pegawai	547.570.000			100	Pegawai	212.070.000
2	18	01	1.05	02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	Paket	462.570.000	APBD		6	Paket	127.070.000
2	18	01	1.05	09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10	Orang	85.000.000	APBD		10	Orang	85.000.000

2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana		12 Bulan	1.028.706.855			12 Bulan	1.028.706.855
2	18	01	1.06	01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Paket	24.714.144	APBD		9 Paket	24.714.144
2	18	01	1.06	02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Paket	261.823.544	APBD		8 Paket	261.823.544
2	18	01	1.06	05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	5.975.000	APBD		12 Paket	5.975.000
2	18	01	1.06	06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Dokumen	19.200.000	APBD		96 Dokumen	19.200.000
2	18	01	1.06	09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109 Laporan	712.200.000	APBD		109 Laporan	712.200.000
2	18	01	1.06	11	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	4.794.167	APBD		5 Dokumen	4.794.167
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana		76 Unit/Tahun	797.590.000			76 Unit/Tahun	577.570.000
2	18	01	1.07	02	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0			0 Unit	0

2	18	01	1.07	05	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	220.020.000	APBD		1 Unit	0
2	18	01	1.07	06	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Paket	49.500.000	APBD		36 Paket	49.500.000
2	18	01	1.07	02	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 Unit	528.070.000	APBD		38 Unit	528.070.000
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana		12 Bulan	961.365.591			12 Bulan	961.365.591
2	18	01	1.08	02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	515.500.041	APBD		12 Laporan	515.500.041
2	18	01	1.08	03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	105.843.550	APBD		12 Laporan	105.843.550
2	18	01	1.08	04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	340.022.000	APBD		12 Laporan	340.022.000
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara		6 Kegiatan	1.356.690.800			6 Kegiatan	2.392.721.800
2	18	01	1.09	01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	398.775.800	APBD		15 Unit	398.775.800

2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	219.936.000	APBD		8 Unit	219.936.000
2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	608.899.000	APBD		1 Unit	1.644.930.000
2	18	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	129.080.000	APBD		2 Unit	129.080.000
2	18	02			PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal		2 Dokumen	2.000.000.000			2 Dokumen	3.000.000.000
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi		2 Dokumen	2.000.000.000			2 Dokumen	3.000.000.000
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.000.000.000	APBD		1 Dokumen	1.500.000.000
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.000.000.000	APBD		1 Dokumen	1.500.000.000
2	18	03			PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi		10 Laporan	2.000.000.000			10 Laporan	3.500.000.000
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan		10 Kegiatan	2.000.000.000			10 Kegiatan	3.500.000.000

2	18	03	1.01	01	<i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	800.000.000	APBD		3 Dokumen	1.500.000.000
2	18	03	1.01	02	<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	1.200.000.000	APBD		7 Dokumen	2.000.000.000
2	18	04			PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan		12 Hari	3.000.000.000			12 Hari	3.500.000.000
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin		1400 Izin/ Non Izin	3.000.000.000			1400 Izin/ Non Izin	3.500.000.000
2	18	04	1.02	01	<i>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Pelaku Usaha	500.000.000	APBD		2 Pelaku Usaha	500.000.000
2	18	04	1.02	02	<i>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kegiatan Usaha	1.500.000.000	APBD		5 Kegiatan Usaha	2.000.000.000
2	18	04	1.02	03	<i>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	500.000.000	APBD		10 Orang	500.000.000
2	18	04	1.02	04	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan Usaha	500.000.000	APBD		2 Kegiatan Usaha	500.000.000

2	18	05			PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM		100 %	1.500.000.000			100 %	2.250.000.000
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri		7 Perusahaan	1.500.000.000			7 Perusahaan	2.250.000.000
2	18	05	1.01	01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan Usaha	500.000.000	APBD		2 Kegiatan Usaha	750.000.000
2	18	05	1.01	02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Pelaku Usaha	500.000.000	APBD		10 Pelaku Usaha	750.000.000
2	18	05	1.01	03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan</i>	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan Usaha	500.000.000	APBD		2 Kegiatan Usaha	750.000.000
2	18	06			PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan		4 Kegiatan	800.000.000			4 Kegiatan	1.000.000.000
2	18	06	1.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media elektronik yang tersedia		3 Media	800.000.000			3 Media	1.000.000.000
2	18	06	1.01	01	<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	800.000.000	APBD		4 Dokumen	1.000.000.000

BAB V

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disampaikan, untuk memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan.

Selanjutnya kami mengharapkan agar alokasi dana yang sudah kami proyeksikan didalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan Anggaran tahun 2023 ini tidak mengalami perubahan secara signifikan dan berharap dapat ditingkatkan, sehingga apa yang menjadi komitmen kami untuk meningkatkan realisasi investasi secara stabil dan dapat terlaksana.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ttd.

Kepala Dinas PMPTSP



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website: <http://dpmptsp.kaltimprov.go.id> email : humas@dpmptsp.kaltimprov.go.id
iso.dpmptsp@gmail.com, humas.dpmptspkaltim@gmail.com twitter : @dpmptsp_kaltim
Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp : (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446
SAMARINDA 75112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 050.14/418.3/DPMPTSP-SEKR/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Memimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Tim Penyusun yang terdiri dari bidang-bidang teknis dan sekretariat agar Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang disusun lebih proporsional dan sejalan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- b. Bahwa untuk keperluan Penyusunan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan Tim Penyusun.
- c. Untuk mendukung dan menginventarisir dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi kebijakan, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan bagian tugas dari TIM, dan bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat dan mampu ditunjuk sebagai Tim Penyusun sebagaimana disebutkan pada huruf (b) diatas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
14. Permendagri No. 86 tahun 2017
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 ;
- KEDUA** : Tim sebagaimana tersebut pada dicantumkan Pertama Keputusan ini mempunyai tugas ;
1. Menyusun draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Melakukan Evaluasi capaian kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun berjalan sebagai bahan penetapan kinerja pada tahun berikutnya;
 3. Menyusun data-data Program dan Kegiatan pada tahun berikutnya yang akan dikompilasi sebagai bahan SIPD pada tahun selanjutnya;
- KETIGA** : Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, Tim memperhatikan arah dan kebijakan Penanaman Modal Nasional, dan Daerah dengan mengacu pada Rencana Strategis DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur, yang terintegrasi dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda.
Pada Tanggal : 15 Maret 2022

Kepala,



PUGUH HARJANTO, S.STP., M.SI

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197908101998021001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050.14/410.3/DPMPTSP-SEKR/2022, Tanggal 15 Maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENJA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

- I. Penanggung Jawab : Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.
- II. Ketua : Asbudin, ST., M.Si (Kasubbag Perencanaan Program)
DPMPTSP Prov. Kaltim
- III. Sekretaris : Arianto Effendi, S.Sos
- Seksi – Seksi :**
1. Seksi Pengumpulan data : 1. Anita Tyas Fachlizha, SE
2. Ence Deasy Yuniasari, S.S
3. Febrisma Ramadhya Findarti, S.AB
4. Roni Helpani, SP
2. Seksi Pengetikan/Input data : Belin Ruruk, S.Kom
3. Tim Korektor : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
2. Kepala Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha
3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan
4. Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
5. Kepala Bidang Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan

Samarinda, 15 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Timur,



PUGUH HARJANTO, S.STP., M.SI

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197908101998021001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website: <http://dpmpstsp.kaltimprov.go.id> email : humas@dpmpstsp.kaltimprov.go.id
email PTSP : iso.dpmpstsp@gmail.com, humas.dpmpstspkaltim@gmail.com twitter : @dpmpstsp_kaltim
Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp : (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446
SAMARINDA 75112

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT DAERAH PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DPMPTSP PROVINSI, KAB / KOTA SE - KALTIM

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *Delapan* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, telah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi, Kab / Kota Se - Kaltim untuk Tahun 2023 yang di hadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan dan arahan oleh Asisten II Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Paparan dan arahan dari narasumber Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) / Kementerian Investasi dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Pemaparan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 & 2023 oleh seluruh Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah (PD) terhadap materi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan, maka pada ;

Hari/ Tanggal : Selasa, 08 Maret 2022

Jam : 08.00 s/d Selesai

Tempat : Hotel Mercure Samarinda

Jl. Mulawarman No. 171 Samarinda

Forum Perangkat Daerah (PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Timur

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati program/ kegiatan dan indikator kinerja yang disertai target serta rencana kebutuhan, yang diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah (PD) ;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini ;
- KETIGA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran I dan Lampiran II), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah (PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur ;
- KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan sebagai bahan untuk pembahasan RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2023 ;
- KELIMA : Bahwa target investasi pada Tahun 2022 terjadi perubahan dari RAKORTEKBANG Nasional oleh BKPM/Kementerian Investasi sebesar 54 Triliun dari target awal 35 Triliun di luar Sektor Migas dan Non Batu Bara ;
- KEENAM : Bahwa DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur akan mempunyai Program Kerja Major Project yaitu Desk Corner di 9 Kabupaten/Kota sehingga perlunya dukungan dari Bappeda dan anggota Tim TAPD ;
- KETUJUH : DPMPTSP Provinsi Kaltim mempunyai rencana untuk memiliki kantor baru di karenakan penilaian dari Menpanrb /BKPM /Ombudsman dan BPK bahwa fasilitas yang ada sekarang kurang memadai ;

KEDELAPAN : Pada tahun 2023 DPMPTSP Kota Balikpapan akan mengadakan Pertemuan Regional yang diikuti seluruh Stake Holder dalam rangka acara ALKI 2 (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang akan di laksanakan di Balikpapan ;

KESEMBILAN : Perlunya dukungan bersama 10 Kabupaten/Kota untuk mendukung Program Kerja Gubernur Kalimantan Timur (38 Dedicated)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala,

PUGUH HARJANTO, S.STP., M.SI

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197908101998021001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website: <http://dpmptsp.kaltimprov.go.id> email : humas@dpmptsp.kaltimprov.go.id
email PTSP : iso.dpmptsp@gmail.com, humas.dpmptspkaltim@gmail.com twitter : [@dpmptsp_kaltim](https://twitter.com/dpmptsp_kaltim)
Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp : (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446
SAMARINDA 75112

LAMPIRAN I

Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi, Kab / Kota Se - Kaltim

1. Forum Perangkat Daerah Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi, Kabupaten / Kota Se- Kalimantan Timur dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 bertempat di Ruang Crystal 1, Hotel Mercure Samarinda dengan narasumber oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Investasi / BKPM RI dan Seluruh Kepala Bidang DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.
2. Penyesuaian Program/Kegiatan sesuai Kepmen 050-5889 Tahun 2021 dan Penyusunan Renstra Kabupaten/Kota sehingga cascading antara Program/Kegiatan Prioritas Provinsi dengan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota sehingga terjadinya keselarasan kegiatan antara Pemerintahan Provinsi dan Kab/Kota.
3. Forum Perangkat Daerah ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang di wakili oleh Abu Helmi, S.E., M.Si selaku Asisten II Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan dan Laporan Panitia dibacakan oleh Puguh Harjanto, S.T., M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
4. Hingga saat ini, OSS RBA masih dalam proses pengembangan. Sosialisasi dan konsolidasi terus dilakukan oleh BKPM dengan Kementerian terkait. Permasalahan penerbitan PKKPR yang terjadi di Kabupaten/Kota akan disampaikan ke Kementerian ATR/BPN.
5. Pelatihan PTSP yang diselenggarakan oleh BKPM boleh diikuti oleh Non ASN, tapi yang diutamakan untuk mengikuti pelatihan tersebut adalah ASN.
6. Kajian Investasi Industri Manufaktur Pengelolaan Pakan Ternak merupakan salah satu penunjang peluang investasi. Seperti yang diketahui Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki pabrik pakan. Peluang investasi dan pasar juga ada. Terlebih lagi semua Kabupaten / Kota akan menjadi sentral IKN. Oleh karena itu adalah salah satu penunjang peluang investasi.
7. Tim P3K Dinas Peternakan telah menyusun dan melakukan uji public 3 (tiga) buku yaitu buku peluang investasi Sistem Integrasi Sapi – Kelapa Sawit (SISKA), buku Komoditas Ternak dan buku komoditas Telur yang akan disempurnakan dan di launching oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang pastinya akan menjadi media promosi sebuah peluang investasi.
8. Kajian akan diselaraskan dengan kebijakan Pusat, Provinsi dan daerah harus terus mengupdate kendala di Pemerintah Daerah. DPMPTSP Provinsi juga memohon untuk

mengawal karena kendala terbesar saat membuat kajian adalah keterbatasan data. Dan berharap masing-masing daerah dapat mendiskusikan lebih lanjut Pakan Ternak mana yang paling dibutuhkan dan dapat dijual.

9. Dapat dipastikan terlebih dahulu apakah SI KOMPAK dan SI MENAWAN ini adalah aplikasi Kementerian atau aplikasi daerah. Jika aplikasi Kementerian dapat di koordinasikan langsung dengan Kementerian Investasi / BKPM RI.
10. Tenaga Teknis akan dikirimkan ke Kabupaten Paser dan diusahakan akan dilakukan pertriwulan untuk melakukan evaluasi permasalahan yang DPMPTSP Kabupaten terima dari Pelaku Usaha terkait Online Single Submission (OSS).
11. DPMPTSP Provinsi memohon kepada Kabupaten / Kota mengupdate data peluang investasi yang ada di Kabupaten / Kota masing-masing agar dapat meningkatkan kembali peluang investasi.
12. Provinsi akan terus mengupayakan percepatan RT/RW guna membantu terciptanya kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Provinsi Kalimantan Timur.
13. DPMPTSP Provinsi akan memberikan dukungan penuh kepada Kabupaten Paser terkait pembangunan jalan lintas provinsi agar investasi di Kaltim terus meningkat.
14. DPMPTSP Provinsi akan memberikan dukungan penuh kepada DPMPTSP Kota Balikpapan yang akan mengikuti Expo International.
15. Perizinan-perizinan yang bermasalah semua prosesnya dilakukan dan diselesaikan secara hukum, khususnya pada Bidang YANDU melayani perizinan yang bermasalah tersebut. Dan melihat kondisi pada Bidang YANDU tidak memiliki SDM (Pegawai ASN) yang memiliki latar belakang Pendidikan Sarjana Hukum, dan memohon kepada BKD untuk memberikan staf yang kami butuhkan.
16. Bidang YANDU akan meningkatkan kualitas SDM yang tersedia dengan memprogramkan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai penyidik.
17. Bidang YANDU meminta dukungan kepada Bappeda Prov. Kaltim selaku unsur perwakilan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dalam hal Anggaran ditahun yang akan datang, dengan mengusulkan rencana kegiatan seperti ; Publikasi informasi dengan menggunakan konsep *Podcast*, Pelayanan secara Drive Thru dan renovasi gedung DPMPTSP Prov. Kaltim.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website: <http://dpmpstsp.kaltimprov.go.id> email : humas@dpmpstsp.kaltimprov.go.id
email PTSP : iso.dpmpstsp@gmail.com, humas.dpmpstspkaltim@gmail.com twitter : @dpmpstsp_kaltim
Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp : (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446
SAMARINDA 75112

LAMPIRAN II

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah (PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Timur

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	Ir.Hidayanti Darma, M.P.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Bappeda Prov. Kaltim	
2	Dra.Otty Eka Permana Lestari, S.H., MAP.	Sekretaris DPMPTSP Prov. Kaltim	Sekretariat DPMPTSP Prov. Kaltim	
3	Riawati, S.Si.,MEM.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (P2IPM) DPMPTSP Prov. Kaltim	
4	Ir. Andi Agustina MNDP, M.Si	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan (LP2N) DPMPTSP Prov. Kaltim	
5	Noer Adenany, S.Sos.,M.Si.	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal	Bidang Promosi Penanaman Modal (P2M) DPMPTSP Prov. Kaltim	
6	Surya Saputra, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan	Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal (DALAK) DPMPTSP Prov. Kaltim	
7	Dra. Yasintha Purwanti Parera, M.M	Kepala Bidang Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan	Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan (YANDU) DPMPTSP Prov. Kaltim	